

EFEKTIVITAS PENERAPAN *DIGITAL ID* DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH

MUHAMMAD AZKA KHAIRIL

NPP. 31.0022

*Asdaf Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: 31.0022@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Gatiningsih, M.T.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Problems related to the effectiveness of Digital ID implementation are studied with Gibson's (1996) effectiveness theory which has Productivity, Quality, Efficiency, Flexibility and Satisfaction Indicators. This research was prepared to find out how effective the application of Digital ID is in improving population administration services and to find out what are the supporting and inhibiting factors for the application of Digital ID and the efforts made by the Population and Civil Registration Office of Southwest Aceh Regency to optimize and accelerate the achievement of national targets in Digital ID activation. **Purpose:** To determine the effectiveness of the implementation of Digital ID in the Population and Civil Registration Office of Southwest Aceh Regency in overcoming obstacles to the implementation of Digital Id. **Method:** This research is a type of qualitative research with descriptive methods. The data collection techniques used are interviews, observations, questionnaires and documentation. **Results/Findings:** The findings of the research, analyzed using organizational effectiveness theory, indicate that the implementation of Digital ID in improving population administration services at the West Southwest Aceh Population and Civil Registration Office still has some shortcomings in terms of quality, efficiency, and satisfaction, such as indicators related to facilities, infrastructure, the time required for IKD activation, and public satisfaction. **Conclusion:** Based on the results of research and discussions conducted, it can be concluded that the effectiveness of the implementation of Digital Id or Digital Population Identity (IKD) in improving population administration services at the Population and Civil Registration Office of Southwest Aceh Regency

Keywords: Effectiveness, Digital ID, Population Administration

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan terkait efektivitas penerapan *Digital ID* ini dikaji dengan teori efektivitas Gibson (1996) yang memiliki Dimensi Produktivitas, Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas dan Kepuasan. Penelitian ini disusun untuk mengetahui seberapa efektif penerapan *Digital ID* dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan *Digital ID* dan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengoptimalkan dan mempercepat pencapaian target nasional dalam aktivasi *Digital ID*. **Tujuan:** Untuk mengetahui efektivitas penerapan *Digital ID* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengatasi hambatan penerapan *Digital Id*. **Metode:** Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian dengan teori efektivitas organisasi menunjukkan penerapan *Digital ID* dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan *Digital Id* atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat daya. **Kata kunci:** Efektivitas, *Digital ID*, Administrasi Kependudukan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi dan komunikasi telah menjadi unsur utama dalam perkembangan masyarakat *modern* pada era digitalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bidang yang mengalami perubahan signifikan adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Kartu Tanda Penduduk yang merupakan salah satu dokumen identitas pribadi yang memegang peran penting dalam berbagai transaksi dan akses ke layanan publik. Era digitalisasi yang terus berkembang memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan data dalam proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk melalui implementasi penerapan *digital Id* atau dikenal dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penerapan teknologi informasi, selain dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan merelasionalkan antara pencatatan sipil dengan pendaftaran penduduk, juga untuk meminimalisasikan campur tangan manusia, sehingga nilai validitas dan kehandalan data-informasi kependudukan yang disajikan tetap tinggi (terpercaya), baik berupa statistik vital maupun statistik kependudukan. (Gatiningsih, 2015) layanan administrasi kependudukan bertransformasi seiring berkembangnya teknologi pada era digitalisasi saat ini, pemerintah sudah mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan administrasi kependudukan menggunakan Identitas Kependudukan Digital atau *Digital id* yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat, Blanko KTP dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital pada tanggal 1 April 2022 yang mana perkembangan teknologi akan dapat memberikan pengaruh pada proses standarisasi dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengimplementasikan identitas kependudukan digital, baik itu secara input maupun secara output.

Digital Id merupakan suatu aplikasi yang difungsikan untuk mentransfer data pribadi melalui informasi elektronik yang muncul sebagai data agar dapat merepresentasikan dokumen kependudukan pada aplikasi digital dengan pengoperasian gawai yang menunjukkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan dengan identitas kependudukan digital, masyarakat tidak perlu lagi menyimpan KTP cetak. Cukup tampilkan kode *Quick Response* (QR) di aplikasi identitas kependudukan digital untuk keperluan administratif.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data *Geographic Information System* (GIS) Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya berjumlah 154.800 jiwa pada tahun 2023 dapat diamati pada tabel berikut :

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Laki-laki	78,058	50,43
2	Perempuan	76,742	49,57
Total		154.800	100

Sumber : *gis.dukcapil.kemendagri.go.id (2023)*

Menurut data dari tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu 78,058 (50,43%) jiwa laki-laki, dan 76,742 (49,57%) jiwa perempuan. Sehingga secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 154.800 jiwa.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya jumlah penduduk wajib e-KTP perkecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Wajib e-KTP Perkecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Wajib E-KTP		
		LK	PR	Jumlah
1	Blangpidie	8.259	8.519	16.778
2	Tangan-Tangan	5.070	5.010	10.080
3	Manggeng	5.577	5.518	11.095
4	Susoh	8.911	9.094	18.005
5	Kuala Batee	7.933	7.874	15.807
6	Babah Rot	7.597	7.349	14.946
7	Setia	3.209	3.143	6.352
8	Jeumpa	4.111	4.129	8.240
9	Lembah Sabil	4.063	4.138	8.201
Total		54.730	54.774	109.504

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya (2023)*

Berkaitan dengan data tersebut Kecamatan Blangpidie berjumlah 16.778 orang (15%), Kecamatan Tangan-tangan berjumlah 10.080 orang (9%), Kecamatan Manggeng berjumlah 11.095 orang (10%), Kecamatan Susoh berjumlah 18.005 orang (16%), Kecamatan Kuala Batee berjumlah 15.807 orang (14%), Kecamatan Babah Rot berjumlah 14.946 orang (14%), Kecamatan Setia berjumlah 6.352 orang (6%), Kecamatan Jeumpa berjumlah 8.240 orang (8%) , Kecamatan Lembah Sabil berjumlah 8.201 orang (7%). Dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib e-KTP di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2023 yaitu mencapai 109.504 orang (71%). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan target dalam penerbitan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau *Digital Id* yaitu sebanyak 25% dari total perekaman.

Kabupaten Aceh Barat Daya hingga saat ini telah mengaktivasi sebanyak 3.351 Identitas Kependudukan Digital atau sekitar 3,06% dari total perekaman. Jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi Identitas kependudukan Digital di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Pencapaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023

Uraian	Kabupaten Aceh Barat Daya	Target Nasional
Jumlah Rekam Wajib e-KTP	104.048	108.846
Persentase	95.50%	99,4%
Telah Aktivasi IKD	3.351	27.376
Persentase	3,06%	25%

Sumber : drka.acehprov.go.id (2023)

Berdasarkan data tersebut jumlah rekam wajib e-KTP berjumlah 104.048 orang (95,50%) dan yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital berjumlah 3.351 orang (3,06%). Dapat disimpulkan bahwa jumlah rekam wajib e-KTP dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Aceh Barat Daya masih berada dibawah target nasional dimana target nasional dalam jumlah rekam wajib e-KTP yaitu 108,846 orang (99,4%) dari jumlah wajib e-KTP di Aceh Barat Daya yaitu 109,504 dan dalam aktivasi IKD di Aceh Barat Daya juga masih dibawah target nasional yaitu 25% atau 27.376 orang.

Menurut data Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) dalam monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya jumlah pencetakan Kartu Identitas Anak sudah melebihi dari target nasional yaitu pencapaian sebesar 52,03% dengan target nasional sebesar 50%, kepemilikan Akte Kelahiran sudah melebihi target nasional dengan pencapaian sudah 103,34%, Pencapaian Buku Pokok Pemakaman sudah melebihi target nasional sebesar 75% dengan capaian saat ini yaitu sebesar 99,00%, akan tetapi pada perekaman KTP-el sebesar 95,50% sedangkan target nasional sebesar 99,4% masih terjadi kekurangan sebesar 3,90% dan pencapaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital baru mencapai sebesar 3,06% sementara target nasional sebesar 25% dari yang sudah merekam KTP-el. Data aktual ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan perekaman KTP-el dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital belum mencapai target nasional. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya pada bulan Juni tahun 2023 ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak warga belum memiliki KTP-el yaitu diakibatkan oleh jaringan atau server yang sering terganggu, begitu juga dengan blangko yang sering terjadi kekosongan ketika masyarakat tersebut hendak mengurus KTP-el hal itu membuat masyarakat menjadi malas untuk kembali mengurus KTP-el mengingat gangguan server atau tibanya blangko yang tidak bisa dipastikan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbatasan dalam penyediaan Blangko e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dan di era digitalisasi pada saat ini transformasi teknologi menciptakan Identitas Kependudukan Digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait pelayanan administrasi kependudukan:

Penelitian oleh Munawarah Sahib (2016) dengan judul *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*

menemukan bahwa Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Program Keluarga Harapan berjalan dengan baik dan mempunyai dampak yang penting terhadap penanggulangan kemiskinan faktor tambahan juga menjadi penentu dalam pengurangan tingkat kemiskinan, seperti Jamkesmas dan BPJS gratis bagi penduduk miskin, program modal usaha bagi rakyat kecil, beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan lainnya.

Penelitian oleh Winda Mediana(2021) dengan judul *Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau* menemukan bahwa manfaat dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, belum mencapai keseluruhan yang diharapkan. KPM PKH menghadapi kesulitan ketika menerima akses ke sarana kesehatan dan pendidikan. Tidak ada prosedur operasi standar (SOP) untuk melaporkan masalah KPM PKH yang berkaitan dengan BPNT yang tidak tersistem. Selain itu, ada masalah dengan data administrasi KPM PKH di E-PKH.

Penelitian selanjutnya yang berjudul *Efektivitas PKH di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang* oleh Nurul Najidah, Dra. Hesti Lestari, MS, menunjukkan bahwa program PKH tidak sepenuhnya efektif karena hambatan implementasi seperti kurangnya koordinasi, perencanaan, dan layanan yang tepat. Rekomendasi termasuk meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan, menetapkan tujuan yang jelas, dan menciptakan kebijakan transparan untuk mencapai efektivitas dalam Program Keluarga Harapan di Desa Rowosari (Nurul, 2019).

Penelitian Soswati Saragi, Maria Ulfa Batoebara, dan Nur Ambia Arma dengan judul *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak (2021)*, mengungkapkan bahwa pemilihan peserta untuk PKH didasarkan pada data yang ada dalam sistem Data Kesejahteraan Sosial Terintegrasi (DTKS), tetapi tantangan dihadapi dalam pelaksanaan, seperti kesulitan mengumpulkan semua peserta bersama setiap bulan. Terlepas dari rintangan, program PKH di Desa Kota Rantang telah berdampak positif pada pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perawatan kesehatan, dengan evaluasi rutin yang memastikan bantuan mencapai penerima yang dimaksudkan.

Penelitian Solehudin dengan judul *Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Pendidikan Pada Masyarakat Kelas Sosial Menengah Bawah* temuan penelitiannya pada pelaksanaan PKH, mengalami beberapa konteks permasalahan dimana pengelolaan saluran dana kurang dikelola dengan baik, kurang optimalnya dikarenakan biaya yang dibagikan tidak sesuai dengan pendidikan yang layak bagi warga Kampung Cikawati (Solehudin, 2022).

Permadi & Rokhman (2023), *Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi* menghasilkan pentingnya proses sosialisasi secara intens tentang prosedur aktivasi serta manfaat manfaat aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk menggantikan KTP-el di Kabupaten Banyumas..

Juhaeriah (2015),*Evaluasi Penerapan Siak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang* menghasilkan evaluasi penerapan SIAK di Disdukcapil Kota Tangerang yang ditinjau menggunakan teori Kesuksesan Sistem Informasi.

Yustika Oktora Domas (2022), *Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara* menghasilkan kualitas pelayanan yang menunjukkan bahwa pelayanan publik berbasis online yang diterapkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara terlaksana dengan efektif dan efisien didukung oleh kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021) *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19* penulis menemukan bahwa penggunaan *electronic government* masih membutuhkan pematapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan seperti efisiensi (*efficiency*), kepercayaan (*trust*), reliabilitas (*reliability*), maupun dukungan masyarakat (*citizen support*). Hambatan pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital masih belum dapat dihindari, dikarenakan *e-government* di Indonesia yang masih berkuat dengan masalah teknis. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang berbasis digital.

Hariman Satria (2020) *Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik* Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan mengenai pencegahan korupsi pelayanan publik dalam optik kebijakan kriminal. Metode kajian menggunakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang dan konseptual.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu EFEKTIVITAS PENERAPAN *DIGITAL ID* DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan *Digital Id* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mendeskripsikan beragam faktor pendukung dan penghambat yang dialami pada proses implementasi *Digital Id* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *Digital ID* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengatasi hambatan penerapan *Digital Id*.

II. METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk secara ilmiah mengatasi masalah atau menjawab pertanyaan yang muncul melalui langkah-langkah yang terstruktur dan dikendalikan dengan cermat berdasarkan penelitian ilmiah. Proses ini menekankan pemikiran kritis dan penggunaan metode ilmiah dalam menganalisis data yang relevan, dan dalam ranah penelitian, beragam pendekatan dapat diterapkan, seperti pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, maupun pendekatan kombinasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan dalam upaya memahami suatu peristiwa yang mempelajari tentang permasalahan sosial manusia berdasarkan metode metode. Dalam penelitian kualitatif peneliti dituntut untuk mampu membuat gambaran secara kompleks dan menyeluruh serta dapat menganalisis pernyataan-pernyataan dari informan secara baik dan metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Selain untuk menggambarkan peristiwa, model deskriptif dapat digunakan untuk memberi makna dan penyelesaian pada permasalahan yang dihadapi. (Sugiyono, 2013). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah data yang dapat ditangkap dan diamati oleh peneliti, baik berupa pernyataan tertulis maupun lisan. Selain itu, sumber data juga dapat berasal dari dokumen, laporan, dan lain-lain. (Moleong, 2009) Sumber data penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian seperti kata kata lisan dari informan yang dapat dipercaya kebenarannya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, seperti dokumen, laporan, dan lain-lain. (Arikunto S., 2019) Berdasarkan uraian tersebut, sumber data penelitian dapat berupa data primer dan sekunder yang dibedakan berdasarkan penerimaan oleh Peneliti. Sumber data yang didapatkan oleh Peneliti secara langsung disebut sebagai data primer. Contoh sumber data primer adalah data hasil wawancara, catatan Peneliti, data hasil observasi dan data kuesioner yang dilakukan Peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penerapan *Digital Id* Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya
Identitas Kependudukan Digital (*Digital Id*) adalah sistem identitas kependudukan digital yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dimana identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan layanan administrasi kependudukan di Indonesia. *Digital Id* juga memiliki fitur keamanan yang ketat untuk melindungi data kependudukan masyarakat. Data pribadi yang disimpan dalam sistem ini dijaga kerahasiaannya dan dijamin keamanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.1.1 Efektivitas Penerapan *Digital Id* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Diukur Dari Indikator Produktivitas

Produktivitas merujuk pada evaluasi dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks produktivitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Barat Daya, produktivitas dapat diukur dengan mengevaluasi sejauh mana Disdukcapil tersebut melakukan sosialisasi dan menerapkan prosedur layanan *Digital Id* sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Sosialisasi merupakan langkah penting dalam memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang *Digital Id*. Disdukcapil Aceh Barat Daya dapat mengevaluasi produktivitas sosialisasi dengan melihat seberapa luas jangkauan sosialisasi yang dilakukan, jumlah masyarakat yang terlibat, dan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan manfaat *Digital Id*. Jika sosialisasi gemar dilakukan maka dapat dikatakan bahwa Disdukcapil Aceh Barat Daya telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait layanan Digital Id.

3.1.2 Efektivitas Penerapan *Digital Id* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Diukur Dari Indikator Kualitas

Kualitas merujuk pada tingkat keunggulan atau kebaikan suatu hal dalam hal fitur. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dapat berkontribusi pada kualitas aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Fasilitas yang memadai mencakup infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet yang stabil dan cepat, perangkat keras yang memadai seperti komputer atau smartphone, serta lingkungan yang nyaman untuk melakukan aktivasi. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang terpercaya dalam hal keamanan dan keakuratan data juga merupakan faktor penting

dalam kualitas aktivasi IKD. Aplikasi yang terpercaya dan akurat harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Dengan adanya keamanan dan keakuratan data yang terjamin, pengguna dapat memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital, sehingga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

3.1.3 Efektivitas Penerapan *Digital Id* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Diukur Dari Indikator Efisiensi

Dalam konteks penerapan Identitas Kependudukan Digital atau *Digital Id* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, efisiensi dapat diukur dengan mengevaluasi waktu yang diperlukan dalam mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital dan apakah ada biaya yang harus dikeluarkan. Dengan mengukur waktu yang diperlukan dalam mengaktivasi *Digital Id* dan biaya yang harus dikeluarkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dapat mengevaluasi sejauh mana penerapan *Digital Id* memberikan efisiensi dalam pengelolaan identitas penduduk. Jika waktu yang diperlukan lebih singkat dan biaya yang harus dikeluarkan lebih rendah, maka dapat dikatakan bahwa penerapan *Digital Id* telah berhasil mencapai efisiensi dalam pengelolaan identitas.

3.1.4 Efektivitas Penerapan *Digital Id* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Diukur Dari Indikator Fleksibilitas.

Untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan *digital id* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang di ukur dari indikator fleksibilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Jawaban Responden Terkait Pertanyaan Indikator Fleksibilitas

No	Pernyataan Pada Indikator Fleksibilitas	Rekapitulasi Jawaban			Jumlah Skor	N of Item	Jumlah Nilai	Kategori
		TS (1)	KS (2)	S (3)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aplikasi Identitas Kependudukan Digital bisa di akses melalui perangkat android dan ios		1	29	89	30	98.89%	Sangat Efektif

Sumber: Hasil penelitian tahun 2024 (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa untuk pertanyaan pada indikator fleksibilitas yaitu aplikasi Identitas Kependudukan Digital bisa di akses melalui perangkat android dan ios maka dijawab tidak setuju oleh 0 orang responden , kurang setuju sebanyak 1 responden dan setuju sebanyak 29 orang responden. Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa dominan responden menjawab setuju untuk pertanyaan yaitu aplikasi Identitas Kependudukan Digital bisa di akses melalui perangkat android dan ios. Sehingga persentase pada tabel 4.12 indikator fleksibilitas ini secara keseluruhan sebesar 98,89% dengan kategori sangat efektif. Dalam artian Aplikasi Identitas Kependudukan Digital sudah bisa diakses melalui android ataupun ios hal ini membuktikan bahwa aplikasi Identitas Kependudukan Digital sudah memenuhi kriteria efektivitas pada indikator fleksibilitas dalam menghadapi perubahan.

3.1.5 Efektivitas Penerapan *Digital Id* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Diukur Dari Indikator Kepuasan.

Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan positif dan puas yang dirasakan oleh seseorang setelah memperoleh atau mengalami sesuatu yang sesuai dengan harapan atau keinginannya. Dalam konteks evaluasi kinerja pegawai Disdukcapil dalam aktivasi IKD kepuasan masyarakat dapat diukur dengan seberapa puas mereka terhadap layanan administrasi kependudukan yang diberikan. Untuk mengevaluasi seberapa puas masyarakat terhadap kinerja pegawai Disdukcapil dalam aktivasi IKD dan penggunaan KTP elektronik, beberapa faktor yang dapat diperhatikan antara lain:

1. Kecepatan dan efisiensi pelayanan: Seberapa cepat dan efisien pegawai Disdukcapil dalam memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
2. Kualitas pelayanan: Seberapa baik pegawai Disdukcapil memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan akurat kepada masyarakat serta fasilitas yang mendukung dalam aktivasi IKD tersebut.
3. Kemudahan akses: Seberapa mudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan yang disediakan oleh Disdukcapil, termasuk aktivasi IKD.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Alokasi Anggaran yang Belum Memadai Salah satu faktor penghambat efektivitas penerapan Digital ID dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya adalah alokasi anggaran yang belum memadai. Kurangnya anggaran yang menyebabkan terbatasnya fasilitas seperti komputer dan tenaga kerja yang diperlukan untuk aktivasi IKD. Tanpa fasilitas yang memadai, proses penerapan *digital Id* dan aktivasi IKD dapat terhambat dan menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan layanan administrasi kependudukan. Temuan tersebut sama seperti temuan dari penelitian Moh. Azhar Ramdani, (2022) yaitu sama-sama terhambat oleh anggaran yang belum memadai.

IV. KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mitigasi penanggulangan bencana kebakaran sudah baik. hal yang tampak melalui dimensi yaitu: *Strength* (Kekuatan) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran melalui langkah-langkah tersebut mencakup: edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar; inspeksi serta sertifikasi bangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan; program pelatihan dan peningkatan kesadaran. Diperlukan evaluasi mendalam untuk mengevaluasi kembali strategi yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan agar upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Weakness* (Kelemahan) Banyaknya sarana dan prasarana yang belum memadai. dengan sebagian besar unit pemadam kebakaran yang berusia di atas 20 tahun dan kurangnya unit mobil penyelamatan. Dari situasi ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Damkarmat menghadapi tantangan dalam menyediakan perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan. Dampak dari kelemahan ini dapat termasuk penurunan kinerja operasional, peningkatan risiko bagi personel, dan penurunan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. *Opportunity* (Peluang) Masih kurangnya tenaga kerja yang memenuhi posisi pada saat tanggap darurat sehingga perlu adanya penambahan. Saat ini proses evakuasi masih mengharapkan relawan yang ada di setiap kelurahan dibantu oleh instansi terkait yang hasilnya akan kurang maksimal dikarenakan kurangnya personil dan pengetahuan mengenai mitigasi bencana kebakaran. Meningkatkan efektivitas Kerjasama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah

dalam penanggulangan bencana kebakaran. Bantuan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri): dapat berupa alokasi dana, pelatihan, peralatan pemadam kebakaran, dan bantuan teknis lainnya. Dengan adanya dukungan ini, Kota Pematangsiantar dapat memperkuat kapasitasnya dalam memitigasi risiko kebakaran, meningkatkan respons cepat terhadap kejadian kebakaran, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya pencegahan. *Threats* (Ancaman) Masih kurangnya kesadaran masyarakat sehingga dapat menghambat upaya pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan strategi penanggulangan bencana kebakaran di Kota Pematangsiantar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya beserta jajarannya, Masyarakat Kota Pematangsiantar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Arikunto S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gatiningsih. (2015). *Identifikasi Data Base Kependudukan sebagai Produk Pelaksanaan Sistem, Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Disdukcapil*. Volume 3, Nomor 2. 107- 126
- Juhaeriah, E., Supriadi, O., & Listyaningsih, L. (2015). *Evaluasi penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (siak) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tangerang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). [EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN \(SIAK\) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG - EPrints Repository UNTIRTA](#)
- Mediana, D. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/13906>
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/23514>
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwarah, S. (2016). Pengaruh kebijakan program keluarga harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.. Skripsi. UIN Alaudin. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1798>
- Permadi, I.B., dan Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration*

- Silampari*, Volume 4(2), 105-115 [Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi | JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari \(ipm2kpe.or.id\)](#)
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 8(1), 1-10. https://www.researchgate.net/publication/355401679_analisis_pelaksanaan_program_keluarga_harapan_pkh_di_desa_kota_rantang_kecamatan_hampan_perak
- Satria, H. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169-186. abdulharis.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/444/2023/02/Korupsi-dan-Pelayanan-Publik-1.pdf
- Solehudin, C. R. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Pendidikan Pada Masyarakat Kelas Sosial Menengah Bawah (Studi Kasus Di Kampung Cikawati Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat) (Doctoral Dissertation, Fkip Unpas). <https://repository.unpas.ac.id/60687/>
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta M
- Supratman, J. S. (2019). Efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kelurahan belawan ii kecamatan medan belawan kota medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7234>
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224. [Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital \(E-Government\) di Era Pandemi Covid-19 | Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi \(stialanbandung.ac.id\)](#)
- YUSTIKA, O. D. (2022). *Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipilkabupaten Lampung Utara* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). [EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LAMPUNG UTARA - Raden Intan Repository](#)

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat